

Penerapan E-Procurement Dalam Mendukung Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tangerang

¹Widia Nurhasan, Hilman, Fitri Firdiyani

¹Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, Indonesia; Nurhasanwidia@gmail.com

Received: April 16, 2023; In Revised: June 19, 2023; Accepted: August 23, 2023

Abstract

Electronic procurement of goods and services, or e-procurement, enables innovation in government and leverages technology platforms to obtain better information, better cost performance, greater efficiency, and maximize the effectiveness of e-procurement. It is an information system that transforms. The purpose of this study is to determine the "implementation of e-procurement in the support of goods and services in the public works and spatial planning sector of Tangerang Municipality". A qualitative research method was used in this study. The data sources used are primary data from interviews and observations and secondary data from documents and relevant regulations. The variables used are a) efficiency, b) effectiveness, c) competitiveness, d) transparency, and e) accountability. The survey shows that the implementation of e-procurement to support the procurement services for goods and services at the Tangerang PUPR office is on track and provides greater transparency to the public. Human resources as well as facilities and infrastructure are one of the factors that influence the process of conducting e-procurement for the public to be successful, but if the effort still causes disruption to the system. there is. By increasing the server capacity, you can continue to use it properly. At the civil engineering office.

Keywords: Local Government, Electronic Procurement, Application System, Goods Services.

Pendahuluan

Dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui sistem pengadaan elektronik, digunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung penawaran secara elektronik. Aplikasi pengadaan secara elektronik diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penggunaannya, seperti: B. standarisasi proses pengadaan, transparansi dan efisiensi pengadaan yang lebih besar, ketersediaan informasi harga satuan tertentu secara internal dan mendukung akuntabilitas proses pengadaan.

Secara umum e-procurement dapat dilakukan dengan dua cara yaitu e-bidding dan e-procurement. E-bidding adalah proses pemilihan pemasok yang dilakukan secara transparan dan dapat dilacak secara elektronik oleh seluruh pemasok yang terdaftar dalam sistem pengadaan, sedangkan pengadaan elektronik adalah proses pembelian barang dan jasa melalui katalog online, dengan E-Catalog itu sendiri sebagai sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi dan harga barang tertentu dari berbagai pemasok barang dan jasa.

Indonesia mulai mengadopsi e-procurement sebagai sistem pengadaan barang dan jasa pada tahun 2002 (Indrajit, 2002), yang dikembangkan dalam tiga tahap: (1) Menyalin ke Internet, yaitu melihat proses pembelian dan hasil barang/jasa yang disampaikan oleh panitia pembelian melalui internet (sistem lelang); (2) Akuisisi semielektronik, yaitu perolehan barang/jasa yang sebagian prosesnya dilakukan melalui media elektronik (Internet) secara interaktif antara pengguna jasa dan penyedia jasa dan sebagian lagi bersifat manual (tradisional); (3) Lengkap e-belanja, yaitu proses pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan dengan mengirimkan dokumen penawaran (file) melalui sistem pengadaan secara elektronik, sedangkan dokumen pemilihan/lelang masih ditangani sendiri antara pengguna jasa dan penyedia jasa.

Inti dari pengadaan elektronik adalah layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, sistem ini berupaya mengelola transaksi melalui sistem database terintegrasi komputer dan internet. Tujuan akhir yang diinginkan adalah terwujudnya nilai-nilai good governance. Secara umum, e-procurement mengacu pada pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang diperlukan untuk kebutuhan operasional organisasi. Awalnya diharapkan penggunaan e-procurement di sektor publik akan meningkatkan efisiensi organisasi publik seperti bisnis. Selain efisiensi, penggunaan pengadaan elektronik di pemerintahan juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keadilan, transparansi, dan kesetaraan warga negara dalam penyediaan barang dan jasa.

Pengadaan barang dan jasa melalui sistem elektronik dinilai lebih efektif, efisien, dan transparan. Hal tersebut diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perpres No. 54 Tahun 2010. Selain itu, Perpres No. 54 Tahun 2010 juga mengatur tentang pengakuan pengadaan secara elektronik. Pelayanan (LPSE) sebagai unit kerja yang menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik. Dalam hal ini, tanggung jawab akan diatur dalam Peraturan Pokok Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Negara (LKPP).

Sistem pengadaan secara elektronik ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah karena pembelian dilakukan dengan memilih barang dalam sistem untuk mengurangi resiko kesalahan. Semua tender pemilihan barang dan jasa publik dilakukan secara online melalui internet agar prosesnya efisien, efektif dan transparan. Subjek yang dijelaskan secara tidak langsung mempengaruhi kinerja operasi lembaga. Kinerja yang baik khususnya dalam pengadaan mendukung terlaksananya transparansi dan persaingan yang sehat antara pemasok barang dan jasa dengan aparatur pemerintah.

Dinas PUPR Kota Tangerang merupakan salah satu dinas yang menerapkan sistem e-procurement sejak tahun 2016. Dalam melaksanakan e-procurement, Dinas PUPR memiliki empat proses yaitu e-bid, e-bid, e-procurement dan e-procurement. -Mencantumkan dimana keempat proses tersebut dapat diikuti agar pengadaan secara elektronik lebih efektif, efisien, kompetitif, transparan dan akuntabel kepada pihak/masyarakat yang terlibat. Masih terdapat kendala dalam pelaksanaan e-procurement kantor PUPR Tangerang, misalnya dengan sistem online yang biasanya menunjukkan error saat digunakan, atau terdapat kegagalan server pada jaringan yang digunakan. Masalah-masalah ini membutuhkan personel yang akrab dengan sistem pengadaan elektronik. Pengadaan barang dan jasa oleh Dinas PUPR Kota Tangerang diharapkan dapat berjalan dengan baik sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh pemangku kepentingan/masyarakat.

Selain itu, penelitian ini menjadi dasar untuk menguji pengadaan secara elektronik sebagai satu kesatuan mekanisme baik di dalam perusahaan maupun dengan pemasok. Selain itu, diyakini bahwa e-procurement juga meningkatkan kerja sama antara pembeli dan pemasok serta mengurangi persyaratan kepegawaian, meningkatkan koordinasi, mengurangi biaya transaksi, siklus pembelian dan penjualan barang yang lebih pendek, inventaris yang lebih rendah, dan transparansi yang lebih besar adalah alasan utama munculnya berbagai masalah yang dijelaskan di atas.

Berdasarkan sudut pandang tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengadaan secara elektronik pada pelayanan pengadaan barang dan jasa Dinas PUPR Kota Tangerang dilakukan dan (2) untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi. Implementasi e-procurement di kantor PUPR kota Tangerang. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan/pemikiran dari berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan aplikasi pengadaan secara elektronik untuk mendukung pelayanan pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kota Tangerang. Selain itu, dapat memperluas wawasan, memperluas pengetahuan dan menjadi referensi bagi siswa yang terlibat dalam studi tersebut.

Metode Penelitian

Objek yang akan diamati atau dikaji dalam penelitian ini adalah pengadaan secara elektronik pada Biro Pekerjaan Umum dan Perencanaan Wilayah Kota Tangerang. Studi ini berfokus pada aspek apa saja yang dapat membantu meningkatkan kualitas barang dan jasa melalui implementasi pengadaan secara elektronik ini.

Pengumpulan dan pengolahan data dilakukan di satu tempat yaitu di kantor PUPR. Pengumpulan data melalui observasi dan wawancara dengan informan/staf di kantor PUPR Kota Tangerang. Kajian ini menggunakan paradigma konstruktivisme yang memandang realitas kehidupan sosial bukan sebagai realitas alamiah melainkan sebagai hasil konstruksi. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengembangkan konsep kepekaan terhadap masalah yang muncul, mengklarifikasi realitas terkait dengan penelitian teoretis lapangan, dan mengembangkan pemahaman tentang satu atau lebih fenomena yang muncul.

Data kualitatif tidak terstruktur dalam arti data yang diberikan oleh narasumber (individu, partisipan, atau responden yang diwawancarai) sangat bervariasi. Kebebasan untuk mengemukakan pendapat partisipan memungkinkan peneliti untuk lebih memahami masalah yang akan diteliti. Oleh karena itu, data kualitatif sering digunakan dalam penelitian eksplorasi. Menurut Bogdan dan Taylor dalam buku Moleong, metode kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku orang yang dapat diamati.

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Ini adalah teknik penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan tentang informan penelitian dan perilaku subjek penelitian yang diamati. Data primer berupa wawancara dan observasi serta data sekunder berupa studi-studi terdahulu dan dokumen-dokumen sebagai sumber data. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan inferensi.

Hasil Dan Penelitian

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari 5 Bidang yaitu bidang Perencanaan Teknis, Bidang Bina Marga, Bidang Tata Air, Bidang Operasi dan Pemeliharaan dan Bidang Tata Ruang. Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mencakup urusan pekerjaan umum, Penataan Ruang dan Pertanahan. Untuk urusan pekerjaan umum ditangani oleh bidang Bina Marga, bidang Tata Air, bidang Operasi dan Pemeliharaan, untuk urusan pertanahan dan penataan ruang ditangani oleh bidang Tata Ruang, sedangkan bidang perencanaan teknis menangani seluruh kegiatan perencanaan bidang Tata Air dan Bina Marga.

E-procurement adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan secara elektronik dan berbasis website/internet dengan menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi, termasuk lelang umum. Prasyarat pengenalan e-shopping di kota Tangerang yang dimulai sejak tahun 2016 sejauh ini berjalan cukup baik. Pengenalan pengadaan secara elektronik memastikan pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih transparan, akuntabel, dan bebas praktik KKN. Efek positif dari penerapan sistem pembelian elektronik dapat meningkatkan efisiensi rumah tangga lebih jauh lagi, sebesar 15 hingga 20 persen.

Pengadaan Secara Elektronik Pada Layanan PUPR Kota Tangerang Untuk Pengadaan Barang Dan Jasa. Sedangkan deskripsi hasil penelitian ini berdasarkan informasi dan fakta yang dikumpulkan oleh peneliti di lapangan, Willem (2012). Indikatornya adalah sebagai berikut:

Efisien

Efisien berarti pengadaan barang dan jasa harus bertujuan untuk menggunakan sesedikit mungkin sarana dan sumber daya untuk mencapai kualitas dan tujuan dalam waktu tertentu dengan kualitas setinggi mungkin. Seperti yang dilakukan peneliti, salah satu informan mengatakan:

“untuk penerapan e-procurement sendiri untuk pelayanan barang dan jasa tentunya sudah sangat efisien, karena prosesnya sudah melalui sistem dan sudah tersistematis secara sistem elektronik dan pasti nya dari aspek efisiensi sudah sangat terpenuhi mulai dari tahapan, waktu pelaksanaannya tentu sudah sangat efisien untuk proses pengadaan barang dan jasa di PUPR”. (Kepala Bidang Sub Perencanaan Dinas PUPR Hafid Aji, ST).

Selain itu informan dua juga mengatakan bahwa:

“sudah cukup efisiensi, karena dalam penerapannya memudahkan kami dalam mengakses untuk mengikuti kegiatan lelang dibeberapa instansi”. (Staff CV NEO, Jamal Abdul Nasir).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas, peneliti menemukan bahwa pengenalan sistem pembelian elektronik untuk mendukung akuisisi barang dan jasa memang sangat efektif, karena semua proses direncanakan secara sistematis dan memudahkan akuisisi pemasok. Partisipasi dalam semua kegiatan dengan lembaga afiliasi.

Efektif

Efektif artinya pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang ditetapkan serta mempunyai pengaruh/dampak yang sebesar-besarnya. Seperti yang dilakukan peneliti, salah satu informan mengatakan:

“untuk dampak banyak dan lebih khusus lagi dampak positif, karena dengan penggunaan E-procurement ini, pastinya dari segi efektivitas kita dapatkan sesuai dengan kebutuhan kita untuk pengadaan barang jasa dan untuk targetnya pun kita dapatkan sangat sesuai”. (Kepala Bidang Sub Perencanaan Dinas PUPR Hafid Aji, ST).

Selain itu informan dua juga mengatakan bahwa:

“dampaknya cukup baik terlebih menimbulkan dampak dalam hal persaingan, dengan adanya penerapan sistem ini membuat persaingan yang sehat antara perusahaan penyedia/konstruksi lainnya”. (Staff CV NeO, Jamal Abdul Nasir).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas, peneliti menetapkan bahwa implementasi sistem pengadaan elektronik untuk mendukung pengadaan barang dan jasa memiliki banyak efek/manfaat yang telah dijelaskan di atas.

Kompetitif/Bersaing

Kompetitif berarti pengadaan barang dan jasa harus dalam persaingan yang sehat antara sebanyak mungkin pemasok barang/jasa yang memenuhi persyaratan agar barang/jasa yang ditawarkan dapat diperoleh secara kompetitif.

Seperti yang sudah peneliti lakukan, informan satu mengatakan bahwa :

“untuk keunggulan kompetitif tentu saja dari segi kompetisi dan menimbulkan persaingan secara sehat karena melalui sistem semua bisa akses, semua bisa mengikuti proses E-procurement jadi sudah sangat kompetitif dari segi harga pun kita mendapatkan harga yang sangat kompetitif/melalui persaingan yang sehat” (Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas PUPR Kota Tangerang).

Selain itu informan dua juga mengatakan bahwa:

“dari segi kompetitif penerapan E-procurement ini sudah sangat kompetitif dan mudah digunakan serta database yang sudah terintegritasi dengan sistem lainnya” (Staff CV NEO, Jamal Abdul Nasir).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas, peneliti menemukan bahwa pengenalan sistem pengadaan elektronik untuk mendukung layanan pengadaan barang dan jasa memang sangat kompetitif dan persaingan yang sehat antar perusahaan pemasok. Dan untuk menghindari konflik kepentingan, minimalkan konflik kepentingan penyedia layanan yang berbeda.

Transparansi

Transparansi berarti semua aturan dan informasi terkait pengadaan barang/jasa sudah jelas dan diketahui publik. Seperti yang dilakukan peneliti, salah satu informan mengatakan:

“untuk dari tingkat transparansi karena kembali lagi dari sistemnya sendiri bisa diakses dengan siapa saja, bisa di monitoring dengan siapa saja jadi sudah sangat transparan untuk proses pengadaan barang dikita itu bisa dilihat semua dari rencana umum pelelangan sampai proses pelelangan melalui sistem E-procurement karena tahapan sudah ada, proses nya jelas dan dapat dipertanggungjawabkan” (Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas PUPR Kota Tangerang).

Selain itu informan dua juga mengatakan:

“sudah cukup transparan, karena kita bisa lihat secara langsung dari judul kegiatan pekerjaan serta nilainya, dan fair dalam penentuan pemenang lelang” (Staff CV NEO, Jamal Abdul Nasir).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, peneliti mengamati bahwa memang dengan adanya penerapan E-procurement ini dalam mendukung layanan pengadaan barang dan jasa dilihat dari indikator transparan sudah sangat transparan. Karena sistemnya bisa diakses oleh siapa saja, bisa dimonitoring dengan siapa saja. Perusahaan penyedia juga bisa langsung melihat judul dan nilai kegiatannya serta penentuan pemenang lelang dalam setiap kegiatan pun sudah cukup fair.

Bertanggungjawab

Tanggung jawab adalah pegawai PPK yang bertanggung jawab atas pengadaan barang dan jasa. Seperti yang telah dilakukan para peneliti, satu informasi menyatakan sebagai berikut:

“terkait dengan siapa saja yang terlibat dalam proses e-procurement ini tentu saja stakeholder yang terlibatnya ada pengguna anggaran, ppk (pejabat pembuat komitmen dan ada unit layanan pengadaan” (Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas PUPR Kota Tangerang).

Selain itu informan dua juga mengatakan bahwa :

“pihak yang bertanggungjawab atas pengelolaan e-procurement di Dinas PUPR Kota Tangerang ini yaitu instansi terkait, perusahaan pengadaan barang dan jasa” (Staff CV NEO, Jamal Abdul Nasir).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa dengan diperkenalkannya sistem pengadaan elektronik, metrik akuntabilitas untuk mendukung layanan pembelian barang dan jasa menunjukkan bahwa ada banyak pihak yang bertanggung jawab. untuk mengelola pengadaan elektronik ini sebagaimana dijelaskan di atas. Ada pengguna anggaran, pejabat yang membuat komitmen, lembaga pengadaan, dan terakhir perusahaan yang memproduksi barang dan jasa.

Dari hasil wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa penyebaran pembelian elektronik untuk mendukung layanan pengadaan barang dan jasa yang diluncurkan pada tahun 2016 berjalan dengan baik dan didukung secara sistematis oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan memahami fungsionalitas sistem yang ditawarkan. pengadaan barang dan jasa. Sarana dan prasarana yang ada juga sudah mencukupi untuk pelaksanaan proses pengadaan secara elektronik.

Sebagai sebuah analisis, kami melihat bahwa Dinas PUPR Kota Tangerang telah meluncurkan bentuk e-bidding yang dinilai baik karena memanfaatkan kemungkinan teknologi dalam melakukan lelang umum untuk masyarakat. Tugas dari e-procurement sendiri adalah memastikan pengadaan barang di lingkungan pemerintahan dapat berjalan dengan lancar serta memiliki transparansi dan kebebasan. Hasil penelitian ini konsisten dengan Tamigau et al. (2021), dimana proses pengadaan barang dan jasa diketahui memiliki prinsip yang efektif, efisien, transparan dan juga terbuka. Rilis informasi pemerintah umumnya mempengaruhi dukungan untuk layanan yang ditawarkan. Pada dasarnya tugas negara adalah memastikan pengadaan barang dan jasa berdampak pada pelayanan publik. Berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018, ditetapkan bahwa pemerintah berperan penting dalam pengadaan barang dan jasa dengan meningkatkan pelayanan publik (Tamigau et al. 2021).

Aplikasi adalah perpanjangan dari kegiatan yang dirancang untuk melakukan perubahan pada proses interaksi antara tujuan dan kegiatan. Pelaksanaan e-procurement sendiri dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, daya saing, transparansi dan juga bentuk tanggung jawab yang ditunjukkan pemerintah kepada masyarakat. Teori aplikasi Willem (2012) menunjukkan perlunya mempertimbangkan bentuk efisiensi, efektivitas, daya saing, transparansi dan akuntabilitas layanan e-procurement. Dalam hal ini, prinsip-prinsip tersebut dapat membantu untuk lebih menyelenggarakan pelayanan publik yang ditawarkan kepada masyarakat. Teori aplikasi yang digunakan dalam e-procurement adalah pemerintah menunjukkan keinginan untuk menggunakan teknologi informasi untuk mempermudah penyampaian layanan kepada masyarakat.

Bentuk implementasi pengadaan secara elektronik di dinas ketenagakerjaan dan perumahan dibagi menjadi beberapa metode pelaksanaan, seperti e-offer, e-procurement, e-catalogue dan e-bidding. Willem dalam Damayanti dkk. 2013 mendukung argumen ini dengan menunjukkan bahwa sebuah aplikasi mengungkapkan proses fungsional berupa penawaran, pembelian, daftar dan penawaran yang dapat dilakukan secara langsung melalui sistem online. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Siallagan et al. (2022), yang menunjukkan bahwa tujuan dari layanan pengadaan yang dilaksanakan secara elektronik adalah electronic pricing, electronic purchasing, electronic listing dan e-bidding. Hal ini dikarenakan adanya keinginan untuk menciptakan persaingan yang lebih sehat.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerapan E-procurement di Dinas PUPR Kota tangerang

Sumber daya manusia dimana kapasitas staf diperlukan untuk menyelesaikan pengadaan barang dan jasa secara elektronik sehingga pelaksanaan prosesnya lancar. HR profesional yang dapat menangani/mengelola sistem e-procurement ini dengan cukup baik dan memiliki pengalaman 6-7 tahun. Selain itu, sumber daya manusia merupakan komponen utama yang paling penting untuk melakukan sesuatu. Selain faktor dukungan sumber daya manusia, juga terdapat

perangkat/sistem elektronik seperti perangkat komputer yang cukup baik, dan sistem pengadaan elektronik juga cukup baik.

Sarana dan prasarana sangat penting sebagai alat untuk keberhasilan pelaksanaan tugas. Proses operasi yang akan dilaksanakan tidak dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai rencana jika sarana dan prasarana tidak mencukupi. Sampai saat ini sarana dan prasarana layanan PUPR sudah mencukupi, namun masih dilakukan upaya peningkatan kapasitas server, agar tidak ada kendala seperti error atau kesulitan akses saat menggunakan sistem. melanjutkan Sebagai salah satu peserta lelang, Neo menilai, tempat dan infrastruktur kantor PUPR Kota Tangerang dapat mendukung proses pengadaan secara elektronik sehingga proses pengadaan menjadi lebih mudah dan cepat.

Penerapan E-procurement Yang Ideal Menurut Aturan-aturan Yang Ada

1. Yang peirtama ada tahap I: Disclosure

Pada tahap implementasi ini, pemerintah mendorong dan mensosialisasikan peluncuran proyek pengadaan secara elektronik, yang berdampak langsung pada pihak-pihak yang terlibat dalam persaingan publik, yaitu. H. negara sebagai pengusul dan pengusaha sebagai peserta penawaran. Proses ini merupakan sosialisasi dan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam birokrasi.

2. Tahap II: Registration and Distribution

Setelah berhasil menyelesaikan tahap pertama, pemerintah mulai memperkenalkan fungsi otomasi melalui Internet dalam proses pendaftaran dan distribusi. Saat ini website e-procurement akan mengumumkan penawaran proyek dan spesifikasi penawaran melalui website tersebut.

3. Tahap III: Electronic Bidding

Langkah selanjutnya adalah pendaftaran peserta lelang secara elektronik. Pada fase ini, peserta lelang harus memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan seperti kelengkapan administrasi, spesifikasi prestasi kerja, dll. melalui internet.

4. Tahap IV: Advanced Support Services

Pada tahapan terakhir ini terjadi proses penawaran secara elektronik atau online melalui internet dengan menghilangkan proses-proses manual dalam tender. Proses yang paling rumit dan canggih ini mampu menghindari tatap muka antara panitia dan peserta tender sehingga meminimalisasi KKN. Dengan proses tender terbuka elektronik ini, maka harga pemenang tender adalah harga yang paling kompetitif (terjangkau dan berkualitas). Pada tahap ini juga dapat dikatakan bahwa pembangunan E-procurement telah mencapai titik optimal.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan e-procurement di Dinas PUPR Kota Tangerang meliputi faktor sumber daya manusia dan sarana prasarana. Faktor manusia Dinas PUPR Kota Tangerang adalah pengalaman dan pendidikan masing-masing pegawai. Dalam hal ini, pegawai mendapat pelatihan yang cukup tentang proses pelaksanaan pengadaan secara elektronik. Selain itu, staf juga memiliki pengalaman yang cukup dalam pelaksanaan pengadaan secara elektronik, dengan sebagian besar staf memiliki pengalaman kerja 6-7 tahun. Cahyan et al. dari. (2021), diperlukan sumber daya manusia yang terampil untuk mendukung proses pengendalian internal perusahaan. Karyawan yang berpengalaman dapat membantu karyawan lain mengatur pelatihan.

Perusahaan membutuhkan sumber daya berkualitas tinggi untuk dapat menunjukkan keterampilan yang lebih baik yang mempengaruhi hasil kinerja yang disajikan. Rahayuningsih dan Iskandar (2022) menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang berkualitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja organisasi. Bagaimanapun, sumber daya manusia yang berkualifikasi tinggi menunjukkan keterampilan dan kemampuannya di tempat kerja, sehingga memengaruhi perusahaan.

Dari segi sarana dan prasarana, terdapat fasilitas yang memadai dimana karyawan dapat menggunakan komputer dan sistem yang sesuai dengan jaringan internet yang canggih. Meskipun terkadang terjadi crash, sistem tetap dapat digunakan dengan baik ketika kapasitas server layanan PUPR bertambah. Novendri et al. dari. (2019), sistem yang diterapkan dengan benar memengaruhi operasi perusahaan dengan mempertimbangkan peralatan komputasi yang jauh lebih berkualitas.

Jaringan internet yang mengalami kendala menjadi kendala dalam proses deployment sistem. Dalam hal ini, perusahaan harus dapat menganalisa kendala tersebut dan memastikan karyawan dapat menggunakan internet dengan lebih lancar. Anwar & Nurhaid (2019) menunjukkan bahwa sistem fungsional membutuhkan stabilitas online, yang dapat berkontribusi pada kesuksesan di tempat kerja. Jaringan internet yang berkualitas merupakan salah satu fitur dan infrastruktur yang dapat membantu perusahaan menerapkan e-procurement yang baik. Adi (2018) mendukung argumen ini, menunjukkan bahwa implementasi dilakukan oleh kementerian untuk memprioritaskan penyediaan layanan yang memuaskan bagi masyarakat setempat.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengenalan pengadaan secara elektronik dalam pengadaan barang dan jasa oleh Biro PUPR Kota Tangerang menunjukkan bahwa pengenalan pengadaan secara elektronik berjalan cukup baik. Seperti yang dijelaskan dalam Willem Theory (2012), berdasarkan indikator adalah sebagai berikut.

1. Berdasarkan hasil kajian berdasarkan indikator efisiensi, pengenalan pengadaan secara elektronik di kantor PUPR untuk mendukung pengadaan barang dan jasa sangat efektif, karena semua proses menggunakan sistem elektronik/dilakukan secara sistematis dan aman dari segi efisiensi mulai dari langkah-langkah hingga implementasi. Dan dalam penerapannya juga memudahkan CV/kontraktor yang terlibat dalam proses lelang dengan instansi terkait.
2. Penerapan pengadaan secara elektronik untuk mendukung pengadaan barang dan jasa kantor PUPR banyak (efektif) dampak dari pengenalan pengadaan secara elektronik, terutama dalam arti positif. Karena dengan bantuan e-procurement, berarti pengadaan barang dan jasa sesuai kebutuhan dalam hal efisiensi. Tujuan tercapai sesuai dengan tujuan yang dicapai.
3. Adapun indikator daya saing/kompetitif ini tentunya mendorong persaingan yang sehat, karena semua proses ditangani oleh sistem dan setiap orang dapat mengakses dan mengontrol sebanyak mungkin proses pengadaan secara elektronik. Sistem aplikasinya juga sangat mudah digunakan, databasenya terintegrasi, sehingga indikator daya saing ini cukup baik.

4. Pelaksanaan pengadaan secara elektronik berdasarkan indikator transparansi untuk mendukung pengadaan barang dan jasa di dinas ketenagakerjaan dan perumahan cukup baik. Karena siapapun bisa menggunakan sistem tersebut. Secara umum sangat transparan karena langkah dan prosesnya sudah ada, semuanya jelas dan semuanya bisa dijelaskan. CV yang mengikuti proses pengadaan secara elektronik merasa sangat terbuka dan adil dalam menentukan pemenang dari setiap kegiatan.
5. Penerapan pengadaan barang dan jasa secara elektronik oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Indeks Tanggung Jawab ini tentunya terkait dengan Perpres 70 Tahun 2012 dan perubahannya tentang pengadaan barang dan jasa. Tentu ada stakeholder seperti instansi, pengguna anggaran, commissioning officer (PCO) dan tim ULP yang ditugaskan di SEKDA. Selain badan eksternal yang bertanggung jawab, ada perusahaan pembelian barang dan jasa (CV).

Referensi

- Abdulrachman, A. (2001). *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan*. Jakarta: CV. Haji Mas Agung.
- Abidin, N. (2011) *Optimalisasi Pengembangan E-Procurement Pada Sistem Pelelangan Umum Pascakualifikasi Dengan Satu Sampul dan Sistem Gugur (Konsep dan Desain Pengembangan Sebagai Fungsi Kontrol)*.
- Adi, C. S. W. (2018). Analisis Penerapan E-Procurement Menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik: Studi Kasus pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan Papua Barat. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 2(2).
- Ahmad, A.K.A., Haq, N. (2020). Implementasi E-Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (BLPBJ) Sekretariat Daerah Kota Makassar. *Journal Public Policy and Management*, 2(2).
- Andrianto, N. (2007). *Good E-Government: "Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui E-Government"*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Anwar, M. K., Nurhaida, I. (2019). Implementasi Load Balancing Menggunakan Metode Equal Cost Multi Path (ECMP) Pada Interkoneksi Jaringan. *Preservation*, 68(2).
- Arsyad, M., Surriadi, L.O., Anam, S. (2016). Analisa Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik (E-Procurement) pada LPSE Kota Kendari. *Jurnal Ekonomi UHO*, 1(1).
- Cahya, A. D., Rahmadani, D. A., Wijiningrum, A., & Swasti, F. F. (2021). Analisis Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. *YUME: Journal of Management*, 4(2).
- Damayanti, Astrid dan Hamzah, Ardi. (2008). "Pengaruh Penerapan E-Procurement Sebagai Alat Pengendalian Pengadaan Barang/Jasa Pada Pemerintah Kota Surabaya". *Jurnal Infestasi*, 4(2).
- Djojoesoekarto, A.P. (2008). *E-Procurement di Indonesia. Pengembangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerinta Secara Elektronik*. Jakarta: KemitraanWaldo, D. (2006). *Pengantar Studi Administrasi*, Diterjemahkan oleh Slamet W. Admosoedarmo. Jakarta: Aksara Baru.

- Faisal, M., Paruntu, F. Y., & Warka, I. W. (2017). Implementasi E-Procurement Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa Di Disfasna. *Jurnal Prodi Strategi Pertahanan Laut*, 3(3), <http://jurnalprodi.ui.ac.id/index.php/SPL/article/view/137>
- Fitriyah, S. H., Wahyuni, D. S., Julia, A., & Naim, N. N. (2022). Analisis Evaluasi Technology Acceptance Model terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan E-Procurement di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(1), 164–186. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i1.1145>
- Hartana, M. (2015). Efektivitas Penerapan E-Government dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintahan Daerah. *Panggung Hukum*, 1(2).
- Hidayat. (2015). Penerapan E-Procurement di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur”. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 21(2).
- Ndikron, M.S., Santoso, Slamet, R.S. (2016). Implementasi e-Procurement Di Univeirsitas Diponegoro. *Journal of Public Policy Universitas Diponegoro*, 5(1).
- Novendri, M. S., Saputra, A., Firman, C. E. (2019). Aplikasi Inventaris Barang Pada Mts Nurul Islam Dumai Menggunakan Php Dan Mysql. *Lentera Dumai*, 10(2).
- Nugroho, R.S., Wanto, A.H., Trisnawati. Pengaruh Implementasi Sistem Pengadaan Secaral Elektronik (E-procurement) Terhadap Pengadaan barang dan jasa pemerintah (studi kasus Kabupaten Magetan). *Jurnal Administrasi publik Mahasiswa Brawijaya*, 3(1)
- Rahayuningsih, Y. S., Iskandar, S. (2022). Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Menciptakan Budaya Sekolah yang Positif di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Basicedu*, 6(5).
- Rengganis, C., Nurunnisa, M., Sulthan Maulana, M. (2021). Korupsi, Droit De Suit Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. *Indonesian Rich Journal*, 2(2).
- Sawidar, S., Muttaqin, M., & Rauzana, A. (2018). Analisis Faktor-Faktor Penerapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara E-Procurement Terhadap Penyerapan Anggaran Di Kota Sabang. *Jurnal Arsip Rekayasa Sipil Dan Perencanaan*, 1(1), 151–160.
- Siahaya, W. (2012). Manajemen Pengadaan Procurement Management. Bandung: Alfabeta.
- Siallagan, R., Bagus Made Agung Dwijatenaya, I., Musmuliadi. (2022). Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Analysis of. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIMAP)*, 1(1).
- Setiawan, G. (2004). Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sutedi, A. (2012). Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soewarna, H. (2002). Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Solihin, M. (2020). Efisiensi Implementasi EProcurement di Kota Yogyakarta tahun 2008- 2012”. *Jurnal Dimensi*, 9(2).

- Tamigau, M. I., Tinangon, J. J., Afandi, D. (2021). Analisis Sistem Perencanaan Dan Pengadaan Aset Tetap Pada Pengadilan Negeri Amurang. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 16(2).
- Udoyono. (2012). E-procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa untuk Mewujudkan Akuntabilitas di Kota Yogyakarta. 3(1).
- Usman & Nurdin. (2002). "Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Purwanto, S.S. (2008). Kajian Prosedur Pengadaan Jasa Konstruksi Secara E- Procurement. Fakultas Teknik Universitas Palembang. *Jurnal Teknik Sipil*, 9(1).
- Waldo, D. (2006). Pengantar Studi Administrasi, Diterjemahkan oleh Slamet W. Admosoedarmo. Jakarta: Aksara Baru.
- Wijaya, W.H., Indryani, R., Putri, Y.E. (2011). Studi Penerapan E-Procurement Pada Proses Pengadaan Di Pemerintah Kota Surabaya. Surabaya.